

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Akil Mochtar, *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta: Total Media, 2013.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Belshaw Cyril S, *Tukar-Menukar Tradisional dan Pasar Modern*, Jakarta: Gramedia, 1981.

Basu Swastha dan Ibnu Sukatjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta: Gramedia, 1993.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Deliarnov, *Teori Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Djuhad mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah*, Semarang: Undip, 2008.

Ekapribadi, *Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Febrian, *Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektorial*, Palembang: PSKKHPD, 2009.

Firmanzah dan Rizal E. Halim, *Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Edisi Keempat, 2000.

Hermanto Malono, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Jakarta: 2011.

Harjono, *Konstitusi Sebagian Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Johara T. Jayadinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB, 1999.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.

Musri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei Cet 1*, Jakarta: P3ES, 1989.

Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002.

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Prayudi, *Hukum Adiministrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Roger Leroy Miller, *Teori Ekonomi Mikro Intermediate*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Jakarta: Total Media, 2010.

Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Suryadarma, Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di daerah Perkotaan di Indonesia, Jakarta: SMERU, 2007.

Soeratno, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2003.

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Zulkarnain, Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin, Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa, 2006.

JURNAL ATAU ARTIKEL:

Abdul Wahab, “Keberpihakan Kebijakan Pemerintah Pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional)”, *Jurnal Tsafaqah*, Mei 2016.

Agung Pambudi, “Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi”, *Jurnal Jentera*, Oktober – Desember 2006.

Euis Soliha, “Analisis Industri Ritel di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* September 2008.

Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *Jurnal Dinamika Hukum*, September 2010.

Supriyanto, "Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Dinamika Hukum*, Mei 2009.

Weda Kupita dan Rahadi Wasi Bintoro, "Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *Jurnal Dinamika Hukum*, Januari 2012

Warta Warga, Jenis-Jenis Pasar dibedakan Menurut Bentuk Kegiatan, Cara Transaksi dan Menurut Jenis Barangnya, *Jurnal Pelajar Universitas Gunadarma*, Juni 2010.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

